

RASIO KEUANGAN UNTUK MENGETAHUI KINERJA PEMERINTAHAN

FINANCIAL RATIOS TO DETERMINE GOVERNMENT PERFORMANCE

Ester Hesty Kondjol

Politeknik Saint Paul Sorong
ester.hesty.kondjol@gmail.com

Abstrak

Rasio keuangan pemerintahan daerah menunjukkan posisi keuangan yang baik atau buruk dapat dilihat dari kinerja pemerintahannya dan rasio keuangan pemerintahan terdiri dari rasio efisiensi, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio kemandirian keuangan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangannya. Dalam penelitian ini, kami akan melakukan analisis menggunakan rasio-rasio keuangan tersebut untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Data yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama beberapa periode anggaran.

KATA KUNCI : Rasio Keuangan, Kinerja pemerintahan.

Abstract

Local government financial ratios show a good financial position or can be seen from the performance of their government and government financial ratios consist of efficiency ratios, PAD effectiveness ratios, compatibility ratios, growth ratios, financial independence ratios. This type of research aims to analyze financial ratios. In this study, we will conduct an analysis using these financial ratios to assess the financial performance of local governments in managing their regional finances. The data used is the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) which has been determined and implemented by the local government for several budget periods

KEYWORDS: Financial Ratio, Government performance.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah memiliki peran sentral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan keuangan daerah. Sebagai entitas publik yang bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya masyarakat, pemerintah daerah wajib memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Pertanggungjawaban keuangan yang tepat merupakan landasan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dan sejauh mana tujuan pembangunan dapat tercapai.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan alat analisis yang komprehensif dan objektif untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Salah satu alat yang relevan untuk melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk mengukur hubungan antara beberapa item dalam laporan keuangan pemerintah daerah, memberikan gambaran tentang kondisi keuangan, dan membantu dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan fiskal.

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keresasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio-rasio ini memberikan informasi yang berharga tentang kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi pendapatan, efisiensi penggunaan anggaran, prioritas alokasi belanja, pertumbuhan keuangan, dan tingkat ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Dalam penelitian ini, kami akan melakukan analisis menggunakan rasio-rasio keuangan tersebut untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Data yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama beberapa periode anggaran.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kondisi keuangan pemerintah daerah dan memperkuat basis pengambilan keputusan dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hasil analisis ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat.

2. DASAR TEORI

2.1 Kinerja Pemerintahan

Menurut irhami(2012 :2), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintahan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

2.2 Rasio Keuangan Pemerintahan.

Menurut hery (2018 : 138) rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan pemerintahan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kesehatan keuangan pemerintahan dan mengetahui sejauh mana pemerintahan dapat mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan.

2.3 Macam-macam rasio keuangan

Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu organisasi atau entitas, termasuk pemerintahan. Rasio keuangan menggambarkan hubungan antara beberapa item dalam laporan keuangan dan memberikan gambaran tentang keadaan keuangan dan kinerja entitas tersebut.

Dalam konteks pemerintahan, rasio keuangan membantu dalam mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah. Beberapa rasio keuangan yang relevan untuk menilai kinerja pemerintahan meliputi:

- Rasio Efektivitas PAD
- Rasio Efektivitas Keuangan Daerah
- Rasio Keserasian
- Rasio Pertumbuhan
- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

2.4 Fungsi Analisis Rasio Keuangan

Fungsi dari penggunaan rasio keuangan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Rasio keuangan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keuangan pemerintah, yang membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
2. **Pengukuran Kinerja:** Rasio keuangan memberikan ukuran objektif untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah dari waktu ke waktu. Perubahan dalam rasio tersebut dapat mengindikasikan kemajuan atau penurunan kinerja keuangan.
3. **Perbandingan dan Benchmarking:** Rasio keuangan memungkinkan perbandingan kinerja keuangan pemerintah dengan standar industri, benchmark, atau periode sebelumnya. Ini membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau perhatian lebih.
4. **Kebijakan Fiskal:** Rasio keuangan dapat membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengatur kebijakan fiskal, termasuk alokasi anggaran untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.

Namun, penting untuk diingat bahwa rasio keuangan hanya menyediakan gambaran sebagian dari kinerja pemerintahan. Analisis yang lebih komprehensif perlu melibatkan lebih banyak faktor dan konteks untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang kinerja pemerintahan.

3. PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

3.1 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Rasio Efektivitas PAD

dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif

3.2 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutab pendapatannya tersebut efisien atau tidak. . Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.3 Rasio Kecerassian.

Rasio Kecerassian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan dalam Rasio Kecerassian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90% Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi (2010). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan.

Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Untuk rasio belanja modal belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan pembangunan di daerah.

3.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

R = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

3.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer)

antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim, 2007). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Kinerja Pemerintahan, dalam suatu pemerintahan dalam lingkup kerja selalu memerlukan laporan keuangan daerah agar dapat membantu berjalannya aktifitas suatu daerah lebih maju kedepan, dan rasio keuangan dalam pemerintahan dapat di perlukan untuk dapat menggambarkan perbandingan posisi keuangan tersebut. Rasio keuangan juga adalah rasio atau ukuran yang dihitung dari akun-akun atau komponen-komponen di laporan keuangan.

Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja pemerintahan atau perusahaan, untuk melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode waktu, juga membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio keuangan sendiri dapat di analisa dengan baik.

Kinerja Pemerintahan, Kinerja instansi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kinerja pemerintahan juga terikat pada peraturan pemerintah yang buat dari pusat agar suatu kinerja pada pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan yang di berikan

Kinerja Keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

4. KESIMPULAN

kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur menggunakan berbagai rasio keuangan, seperti Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio keuangan ini memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah, termasuk dalam hal penerimaan dan pengeluaran.

1. Rasio Efektivitas PAD memberikan informasi tentang kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan PAD yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio ini, semakin efektif pemerintah daerah dalam memobilisasi pendapatan asli daerah.
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan. Semakin rendah rasio ini, semakin baik kinerja keuangan daerah dalam memperoleh pendapatan dengan biaya yang lebih efisien.
3. Rasio Keceragaman membandingkan alokasi belanja rutin dan belanja pembangunan. Rasio ini mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran. Tingkat keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan menjadi perhatian dalam mengoptimalkan penggunaan dana.
4. Rasio Pertumbuhan mengindikasikan apakah kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami pertumbuhan positif atau negatif dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan yang positif menunjukkan kinerja keuangan yang baik.
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendapatan dari transfer pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini, semakin mandiri keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Analisis rasio keuangan ini membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan memperoleh wawasan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan untuk mencapai keberlanjutan keuangan dan mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Namun, penting untuk memahami bahwa rasio keuangan harus diinterpretasikan dengan cermat dan selalu dianalisis dalam konteks yang lebih luas untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan pemerintahan sangat penting dalam pemuatan laporan-laporan setiap SKPD agar dapat mengetahui pos akun yang diuat sudah sesuai dengan laporan yang diuat dan dapat di pahami oleh semua orang yang memaca laporan keuangannya nanti dan.

Dalam dunia pemerintahan penilaian kinerja pemerintahan sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan laporan keuangan pemerintah agar kelak pada saat pembuatan laporan keuangannya dapat dibuat dengan baik agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses pembuatan laporannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agung, Fitri Batatar dan Zirman. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba.
- [2] Budianto, A. S. (2016). Pengaruh Pad Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.